



## Pendampingan Revitalisasi BUMDES Melalui Studi Kelayakan Usaha Pada Desa Pemuda Kabupaten Tanah Laut

Yasir Hadiani<sup>1\*</sup>, M.Riduan Abdillah<sup>2</sup>, Yuli Fitriyani<sup>3</sup>, Rina Pebriana<sup>4</sup>, Ahmad Edwin Hidayat<sup>5</sup>, Ainurrafiq Wisnu Pratama<sup>6</sup>, Anisa Nur Maulidya<sup>7</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Tanah Laut, Indonesia, 70815

E-mail:\* [yasirhadiani@politala.ac.id](mailto:yasirhadiani@politala.ac.id)

Doi : <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v7i1.2788>

---

### Info Artikel:

Diterima :  
2025-10-07

Diperbaiki :  
2025-11-15

Disetujui :  
2025-11-19

**Kata Kunci:** BUMDes,  
Revitalisasi, Studi Kelayakan  
Usaha, Pemberdayaan  
Masyarakat, Desa

**Abstrak:** Artikel ini membahas program pengabdian kepada masyarakat berupa pendampingan revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pemuda, Kabupaten Tanah Laut. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kinerja BUMDes akibat kurang optimalnya pengelolaan usaha dan belum adanya kajian kelayakan usaha sebagai pengambilan keputusan. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan pendampingan dalam penyusunan studi kelayakan usaha yang mencakup aspek pemasaran, teknis, keuangan, dan manajemen. Metode yang digunakan meliputi observasi lapangan, wawancara dengan pengelola BUMDes, pelatihan proposal penyusunan studi kelayakan usaha, serta pendampingan dalam analisis data. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pengelola BUMDes dalam merancang usaha yang layak dan berpotensi meningkatkan kemandirian desa. Program ini berimplikasi pada penguatan tata kelola BUMDes dan memberikan rekomendasi usaha yang sesuai dengan potensi lokal pada Desa Pemuda.

**Abstract:** This article discusses a community service program in the form of mentoring for the revitalization of the Village-Owned Enterprise (BUMDes) in Pemuda Village, Tanah Laut Regency. This activity was motivated by the low performance of BUMDes due to suboptimal business management and the absence of a feasibility study as a basis for decision-making. The purpose of this program is to provide assistance in preparing a business feasibility study covering marketing, technical, financial, and managerial aspects. The methods used include field observations,

**Keywords:** *Village-Owned Enterprise (BUMDes), business feasibility study, community empowerment, village revitalization, Tanah Laut Regency*

*interviews with BUMDes managers, training on business feasibility proposal preparation, and mentoring in data analysis. The results show an increase in the understanding and capability of BUMDes managers in designing feasible business plans that have the potential to enhance village independence. This program has implications for strengthening BUMDes governance and provides business recommendations that align with the local potential of Pemuda Village.*

---

## **Pendahuluan**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan instrumen strategis dalam upaya mendorong kemandirian ekonomi desa. Sejak diterbitkannya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendesa No. 4 Tahun 2015, BUMDes memiliki posisi penting sebagai lembaga ekonomi desa yang berperan dalam mengelola potensi lokal, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Keberadaan BUMDes diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi berbasis potensi dan kebutuhan desa.

Namun dalam praktiknya, banyak BUMDes menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan usaha. Beberapa masalah yang sering muncul antara lain lemahnya tata kelola organisasi, minimnya kapasitas manajerial pengelola, dan ketiadaan kajian kelayakan usaha yang memadai sebagai dasar dalam memulai atau mengembangkan unit usaha. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat keberhasilan BUMDes dalam menghasilkan keuntungan, sehingga tujuan awal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tidak tercapai secara optimal.

Pemerintah Desa Pemuda, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut bahwa ingin menata tata kelola BUMDes terutama membuat perencanaan dan pengembangan usaha yang berkelanjutan melalui studi kelayakan usaha. Desa Pemuda memiliki potensi sumber daya yang cukup besar, baik di sektor pertanian, perkebunan dan memiliki lingkungan berdekatan dengan sekolah-sekolah. Akan tetapi, BUMDes di desa ini belum mampu mengoptimalkan potensi tersebut karena belum memiliki landasan analisis usaha yang jelas. Kondisi ini menyebabkan pengembangan usaha desa sering dilakukan secara coba-coba dan berisiko tinggi mengalami kegagalan. Oleh karena itu, diperlukan suatu program pendampingan yang mampu memperkuat kapasitas BUMDes melalui penyusunan studi kelayakan usaha sebagai acuan dalam menentukan arah pengembangan unit usaha.

Fenomena lainnya aparaturnya Pemerintah Desa Pemuda harus melengkapi administrasi yakni salah satunya melakukan uji kelayakan usaha atas proposal bisnis yang sudah dibuat. Uji kelayakan usaha bagi BUMDes dapat dilakukan oleh beberapa

pihak seperti Yayasan, Perguruan Tinggi, Koperasi dan lainnya sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut No.86 Tahun 2020. Kelengkapan secara administrasi terkait uji kelayakan pembentukan usaha merupakan salah satu indikator guna menentukan kelayakan usaha BUMDes sebelum memulai usaha sebagaimana Peraturan Bupati Tanah Laut No.86 Tahun 2020.

Berdasarkan permasalahan tersebut, program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk melakukan pendampingan revitalisasi BUMDes di Desa Pemuda melalui pelatihan dan penyusunan studi kelayakan usaha. Dengan adanya studi kelayakan, diharapkan pengelola BUMDes dapat memahami aspek pemasaran, teknis, manajemen, dan keuangan secara lebih terukur, sehingga keputusan usaha yang diambil memiliki dasar yang kuat. Program ini juga diharapkan dapat meningkatkan kinerja BUMDes sekaligus memperkuat perannya dalam pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan. Disisi lain tujuan kegiatan pengabdian ini dilakukan juga mendukung ketercapaian IKU Politeknik Negeri Tanah Laut.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keberadaan studi kelayakan usaha sangat penting dalam pengembangan BUMDes. Sulistiyani (2017) menekankan bahwa revitalisasi BUMDes perlu dilakukan dengan memperhatikan aspek profesionalisme dan kelayakan usaha agar tidak menimbulkan kerugian. Sementara itu, Ridlwan (2018) menyatakan bahwa studi kelayakan dapat menjadi pedoman strategis dalam mengurangi risiko kegagalan usaha desa. Dengan merujuk pada kajian tersebut, program pendampingan ini dirancang untuk memberikan solusi praktis bagi pengelola BUMDes Desa Pemuda agar dapat meningkatkan kualitas pengelolaan usaha sekaligus memberikan dampak sosial-ekonomi yang positif bagi masyarakat desa.

## Metode

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah **Participatory Action Research (PAR)** dengan pendekatan pelatihan dan pendampingan partisipatif. Metode ini dipilih karena melibatkan peran aktif pengurus BUMDes dan perangkat desa dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari identifikasi permasalahan, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Melalui PAR, tim pengabdian tidak hanya berperan sebagai fasilitator, tetapi juga mitra belajar bagi masyarakat dalam menggali potensi dan menyusun studi kelayakan usaha secara mandiri. Pendekatan ini memungkinkan terjadinya proses pembelajaran kolaboratif yang berkelanjutan, sehingga hasil kegiatan dapat diterapkan secara nyata untuk

meningkatkan kapasitas pengelolaan BUMDes dan pengambilan keputusan ekonomi desa yang lebih efektif.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Pemuda, Kabupaten Tanah Laut dengan fokus pada pendampingan pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menyusun studi kelayakan usaha. Subyek kegiatan adalah pengurus BUMDes dan perangkat desa yang terlibat dalam pengambilan keputusan ekonomi desa. Pendekatan yang digunakan adalah komprehensif dan partisipatif, di mana masyarakat desa dan pengelola BUMDes terlibat secara langsung dalam setiap tahap kegiatan (Rahmawati & Setiawan, 2019).

Pelaksanaan program dilakukan dalam beberapa tahapan.

1. **Persiapan Kegiatan.** Tim pengabdian melakukan observasi dan analisis situasi awal melalui survei awal melalui wawancara dan diskusi dengan pengelola BUMDes serta perangkat desa. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi riil BUMDes, permasalahan yang dihadapi, dan potensi usaha yang dapat dikembangkan (Soleh, 2020). Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan, tim menyusun materi penyuluhan tentang uji kelayakan usaha.
2. **Pelaksanaan Sosialisasi.** Pelaksanaan sosialisasi pentingnya studi kelayakan usaha. Pada tahap ini, tim pengabdian memberikan pemahaman kepada pengurus BUMDes mengenai konsep dan manfaat studi kelayakan sebagai dasar pengambilan keputusan usaha. Peserta kegiatan terdiri dari pelaku UMKM, Pengurus BUMDes, Perangkat Desa. Penyuluhan dilakukan dengan metode ceramah interaktif dan diskusi kelompok dengan menggunakan media pembelajaran seperti slide presentasi dan materi berkaitan studi kelayakan usaha. Selain itu, pelatihan penyusunan studi kelayakan usaha, meliputi aspek pasar, teknis, manajemen, serta keuangan. Peserta diberikan materi, studi kasus, dan contoh format analisis kelayakan usaha yang sederhana dan dapat diaplikasikan di tingkat desa (Ridlwani, 2018).
3. **Evaluasi Kegiatan.** Tahap terakhir adalah evaluasi dengan menilai pemahaman peserta melalui sesi sosialisasi diakhiri dengan diskusi dan tanya jawab untuk memastikan bahwa peserta memahami materi yang telah disampaikan.

Berikut ini flowchart kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan metode komprehensif dan partisipatif sebagai berikut :

Flowchart Metode Sosialisasi Pendampingan Revitalisasi BUMDes



Gambar 1. Flowchart Tahapan Pendampingan Revitalisasi BUMDes

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Hasil

Program pendampingan revitalisasi BUMDes di Desa Pemuda, Kabupaten Tanah Laut, dilakukan melalui serangkaian tahapan mulai dari observasi, sosialisasi, hingga pendampingan penyusunan studi kelayakan usaha. Kegiatan pelaksanaan dilakukan dalam beberapa tahapan.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta dalam melakukan analisis kelayakan usaha yang meliputi aspek pasar, teknis, manajemen, dan keuangan. Sebelum pendampingan, sebagian besar pengurus BUMDes belum memahami pentingnya studi kelayakan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis.

Dampak nyata kegiatan ini terlihat dari peningkatan kemampuan pengelola dalam mengidentifikasi potensi ekonomi lokal, khususnya dalam pengembangan usaha berbasis sumber daya desa seperti hasil pertanian, perikanan, dan wisata lokal (Indahwati et al., 2024). Selain itu, kegiatan ini memperkuat komitmen pemerintah desa untuk melakukan perencanaan usaha berbasis data dan analisis finansial (Pande et al., 2021).

Kegiatan pendampingan revitalisasi BUMDes di Desa Pemuda, Kabupaten Tanah Laut, diikuti oleh pengurus BUMDes dan perangkat desa yang berjumlah 10 orang. Kegiatan dilaksanakan selama tiga tahap utama: sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan intensif. Sebelum kegiatan, hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar pengurus BUMDes belum memahami konsep studi kelayakan usaha, sehingga keputusan usaha cenderung diambil berdasarkan pengalaman atau kebiasaan tanpa perhitungan risiko. Setelah mengikuti kegiatan, peserta

menunjukkan peningkatan pemahaman dalam menganalisis aspek pasar, teknis, manajerial, dan keuangan.

## 2. Pembahasan

Hasil pendampingan menunjukkan bahwa studi kelayakan usaha berperan penting dalam memperkuat tata kelola BUMDes. Sebelum kegiatan, pengelolaan usaha dilakukan tanpa analisis sistematis, sehingga rentan terhadap kegagalan. Hal ini sejalan dengan temuan Ridlwan (2018) bahwa ketiadaan studi kelayakan merupakan salah satu faktor utama kegagalan usaha desa.

Tahap pertama adalah observasi dan analisis situasi awal melalui wawancara dan diskusi dengan pengelola BUMDes serta perangkat desa. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi riil BUMDes Desa Pemuda, permasalahan yang dihadapi, dan potensi usaha yang dapat dikembangkan. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 23 Juli 2025 di Kantor Desa Pemuda, Kecamatan Pelaihari.



*Gambar 2.* Dokumentasi wawancara awal dengan Sekretaris Desa

Berdasarkan informasi dengan Sekretaris Desa, fenomena permasalahan yang pertama terjadi bahwa penyetaraan modal dari Pemerintah Desa dapat diberikan kepada BUMDes dalam rangka perencanaan dan pengembangan usaha hanya jika Bumdes sudah memenuhi kelengkapan administrasi yakni salah satunya melakukan uji kelayakan usaha atas proposal bisnis yang sudah dibuat.

Tahapan kedua melaksanakan sosialisasi pada tanggal 11 September 2025, revitalisasi BUMDes merupakan upaya strategis untuk memperkuat peran lembaga ekonomi desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Ahmad et al. (2024), revitalisasi tidak hanya mencakup penambahan modal, tetapi juga peningkatan kapasitas manajerial dan tata kelola organisasi desa. Hasil pendampingan di Desa Pemuda sejalan dengan pandangan tersebut karena

memperlihatkan perubahan signifikan dalam pola pikir pengurus BUMDes terhadap pentingnya pengambilan keputusan berbasis kajian usaha.

Peningkatan pemahaman pengurus BUMDes setelah mengikuti pelatihan dan pendampingan menegaskan pentingnya metode partisipatif dalam program pemberdayaan masyarakat. Menurut Rahmawati & Setiawan (2019), pendekatan partisipatif mendorong keterlibatan aktif masyarakat sehingga hasil kegiatan lebih berkelanjutan. Dalam konteks Desa Pemuda, keterlibatan langsung pengurus dalam menyusun studi kelayakan tidak hanya meningkatkan keterampilan analisis, tetapi juga menumbuhkan rasa memiliki terhadap hasil kegiatan.



*Gambar 3.* Sosialisasi Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Pengurus BUMDes

Selain itu, hasil kegiatan juga memperkuat gagasan bahwa revitalisasi BUMDes tidak hanya soal penambahan modal atau unit usaha baru, tetapi juga perbaikan tata kelola dan penguatan kapasitas manajerial (Sulistiyan, 2017). Dengan tersusunnya draft studi kelayakan usaha yang komprehensif, BUMDes Desa Pemuda kini memiliki landasan yang lebih kuat dalam menentukan arah pengembangan unit usaha berbasis potensi lokal.



Gambar 4. Peserta menyampaikan pendapat dan bertanya

Melalui sesi diskusi, pengurus BUMDes menyadari bahwa pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara terencana dan berbasis pada hasil *uji kelayakan usaha* agar setiap unit bisnis yang dijalankan memiliki dasar yang kuat dan terukur. Uji kelayakan usaha menjadi instrumen penting dalam menentukan apakah suatu ide atau rencana bisnis layak dijalankan dari aspek pasar, teknis, manajemen, hukum, dan keuangan. Tanpa adanya analisis kelayakan yang komprehensif, keputusan usaha sering kali diambil berdasarkan intuisi atau kebiasaan, yang berpotensi menimbulkan risiko kerugian bagi lembaga maupun masyarakat desa. Menurut Ridlwan (2018), studi kelayakan usaha berperan penting sebagai alat bantu manajerial untuk meminimalkan ketidakpastian dalam investasi BUMDes dan memastikan efisiensi penggunaan dana desa. Sementara itu, Soleh (2020) menegaskan bahwa pengelolaan BUMDes yang profesional harus diawali dengan proses perencanaan berbasis data dan analisis kelayakan agar usaha yang dijalankan tidak hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga memberikan dampak sosial-ekonomi jangka panjang bagi masyarakat desa. Dengan demikian, penerapan uji kelayakan usaha tidak hanya menjadi syarat administratif, tetapi juga merupakan fondasi strategis dalam menciptakan tata kelola BUMDes yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Penguatan kapasitas individu, revitalisasi BUMDes juga menuntut adanya sinergi kelembagaan antara pemerintah desa, akademisi, dan masyarakat (Kurniasih et al., 2022; Andari & Ella, 2021). Kolaborasi ini penting untuk memastikan keberlanjutan program. Dalam konteks pengabdian masyarakat, pendekatan kolaboratif terbukti efektif dalam membangun model ekonomi desa yang lebih tangguh (Sarwani & Listyawati, 2021).

Program pendampingan ini juga mendukung kebijakan nasional dalam Sustainable Rural Development, di mana BUMDes menjadi pilar utama dalam

menyalurkan potensi lokal secara produktif (Soleh, 2020; Ahmad, 2023). Dengan tersusunnya studi kelayakan usaha, BUMDes Desa Pemuda kini memiliki alat analisis yang dapat digunakan untuk mengevaluasi prospek usaha baru secara sistematis.

Oleh karena itu, penyusunan studi kelayakan usaha menjadi langkah strategis dalam revitalisasi BUMDes, tidak hanya sebagai dokumen formal, tetapi juga sebagai pedoman praktis dalam implementasi bisnis desa.



Gambar 5. Dokumentasi Peserta dan Tim Pengabdian Kepada Masyarakat

## Kesimpulan

Kegiatan pendampingan revitalisasi BUMDes melalui penyusunan studi kelayakan usaha di Desa Pemuda, Kabupaten Tanah Laut, terbukti mampu meningkatkan kapasitas pengelola dalam merancang usaha yang lebih terukur dan berkelanjutan. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan pemahaman peserta terhadap aspek pasar, teknis, manajemen, dan keuangan usaha. Hal ini menegaskan bahwa studi kelayakan merupakan instrumen penting dalam memperkuat tata kelola BUMDes sekaligus mengurangi risiko kegagalan usaha.

Selain itu, keterlibatan aktif pengurus BUMDes dalam proses sosialisasi, dalam studi kelayakan usaha telah mendorong terbentuknya rasa memiliki terhadap hasil kegiatan. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya menghasilkan dokumen studi kelayakan, tetapi juga memperkuat kapasitas manajerial dan kemandirian pengelola BUMDes.

## **Ucapan Terima Kasih**

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Desa Pemuda, Kabupaten Tanah Laut, beserta seluruh pengurus BUMDes yang telah memberikan dukungan dan partisipasi aktif selama pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Terima kasih juga disampaikan kepada mahasiswa Program Studi D4 Akuntansi Perpajakan Politeknik Negeri Tanah Laut yang turut berkontribusi dalam proses sosialisasi serta dokumentasi kegiatan.

Ucapan terima kasih yang mendalam juga diberikan kepada Direktur, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) Politeknik Negeri Tanah Laut atas dukungan moral dan pendanaan kegiatan ini, sehingga program dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Semoga kegiatan ini dapat menjadi inspirasi bagi pengembangan dan pemberdayaan ekonomi desa melalui BUMDes yang lebih berdaya dan berkelanjutan.

## **Referensi**

- Ahmad, M.I.S. (2023). *Revitalisasi Ekonomi Pembangunan*. Universitas Hasanuddin Press.
- Ahmad, S.N., Lorens, D., & Rachman, R.M. (2024). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Lembaga Sosial Desa*. Gadjah Mada University Press.
- Andari, R.N., & Ella, S. (2021). *Model Desa Cerdas untuk Membangun Indonesia Maju*. Deepublish.
- Dinan, R., Purnama, S.G., & Pricilla, S.P. (2025). *Wisata Tanpa Jejak: Menuju Zero Waste Tourism*. Andi Publisher.
- Endro, G., & Djamaris, A. (2025). *Ide-Ide Pemikiran dari Kampus Maroon 2024*. Universitas Bakrie.
- Gusty, S., Jamal, M., & Harimuswarah, M.R. (2023). *Ilmu Lingkungan dan Transformasi Desa*. Pustaka Baru Press.
- Indahwati, R., Lubis, A.S., & Harahap, J.P.R. (2024). *Manajemen Keuangan BUMDes dan BUMDesma*. UMNAW Press.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan*

- Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296.
- Kurniasih, Y., Mukti, A., & Winanta, R.A. (2022). Collaborative Governance dalam Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata Desa Ngargogondo. Gramedia.
- Nasrullah, M., Aryani, A.T.D., & Ismanto, K. (2021). Ekonomi dan Kearifan Lokal Petanglong. UIN Walisongo Press.
- Pande, J.S., Muin, S.A., Ahmad, S.N., & Yunus, A.Y. (2021). Ekonomi Desa. Udayana University Press.
- Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. 2020. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 86 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Badan Usaha (BUMDESA) Pelaihari: Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
- Rahmawati, A., & Setiawan, B. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Melalui BUMDes. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 112–121.
- Ridlwani, A.A. (2018). Urgensi Studi Kelayakan Usaha dalam Mengembangkan BUMDes. *Jurnal Ekonomi Desa*, 3(2), 88–97.
- Sarimanah, E., & Masiaga, N. (2023). Model Kolaborasi Aksi Pengabdian Nusantara. Pustaka LPPM.
- Sarwani, A.H., & Listyawati, L. (2021). Sosialisasi Pemasaran Online di BUMDes Sambi Madu. UPN Press.
- Soleh, C. (2020). BUMDes sebagai Basis Pembangunan Ekonomi Desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 9(1), 45–55.
- Sulistiyani, A. T. (2017). Revitalisasi BUMDes dalam Pemberdayaan Ekonomi Desa. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 2(1), 45–60.
- Sumarta, N.H., & Karyono, D. (2023). Auditor Internal dan Konsultan Bisnis Desa: Sebuah Wacana Strategis. UIN Press.